

ABSTRAK

**PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(Studi Kasus: Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung
Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung)**

Oleh

ANISWATI MELINDAFIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat mengenai peran pemerintah desa, untuk mengetahui peran pemerintah desa terhadap implementasi Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia, untuk mengetahui bagaimana permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini dilakukan pada aktor-aktor yang terlibat dalam keterkaitannya terhadap Pekerja Migran Indonesia, meliputi pemerintah desa, mantan Pekerja Migran Indonesia dan warga desa yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Data di dalam penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang peran Pemerintah Desa Tri Tunggal Jaya terbagi atas peran dalam layanan sosial ekonomi, layanan kesehatan, dan pemberdayaan pemuda. Peran pemerintah desa terhadap implementasi Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia yaitu sebagai verifikator, fasilitator, advokator, dan inisiator pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Desa Tri Tunggal Jaya diantaranya kegagalan kerjasama antara pemerintah desa dan Dinas Tenaga Kerja Tulang Bawang dalam melaksanakan pelayanan terhadap Pekerja Migran Indonesia, kegagalan informasi dikarenakan tidak adanya sosialisasi dan desiminasi informasi terkait Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia di pemerintah dan masyarakat Desa Tri Tunggal Jaya.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Desa, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN IMPLEMENTING THE POLICIES OF REPUBLIK OF INDONESIA LAW NUMBER 18 OF 2017 CONCERNING THE PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS (Case Study: Tri Tunggal Jaya Village, Banjar Agung District Tulang Bawang Regency, Lampung Province)

By

ANISWATI MELINDAFIA

The research aims to find out the community's knowledge regarding the role of the village government, to find out of the role of the village government in the implementation of the Indonesian Migran Workers Law, to find out the problems of Indonesian Migrant Workers who do not comply with the procedures of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers in Tri Tunggal Jaya Village, Banjar Agung District, Tulang Bawang Regency. This research was conducted on actors involved in their relationship to Indonesian Migrant Workers, including the village government, former Indonesian Migrant Workers and village residents who were determined using purposive sampling technique. The data in this research was collected using in-depth interviews, observation and documentation, which was then carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that community knowledge about the role of the Tri Tunggal Jaya Village Government is divided into roles in socio economic services, health services and youth empowerment. The role of the village government in implementing the Indonesian Migrant Worker Law is a verifier, facilitator, advocate, and initiator for the empowerment of prospective Indonesian Migrant Workers, Indonesian Migrant Workers and their families. Problems with Indonesian Migrant Workers in Tri Tunggal Jaya Village include failure of cooperation between the village government and the Tulang Bawang Manpower Service in providing services to Indonesian Migrant Workers, information failure due to the absence of socialization and dissemination of information related to the Indonesian Migrant Worker Law in the government and Village Community Tri Tunggal Jaya.

Keywords: *Indonesian Migrant Workers, Village Government, Law Number 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers.*